BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya perkembangan teknologi dan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya

laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan akurat dengan anggaran menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap pemerintah, baik pusat maupun daerah harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran,dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja disini menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas rasio pertumbuhan (Halim, 2004:150-158).

Keberhasilan pemerintah daerah tidak terlepas dari manajemen pengelolaan keuangannya karena keuangan daerah merupakan urat nadi keberlangsungan pemerintah dan aktivitas pokok yang sangat mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Dengan diterapkannya penyusunan anggaran berbasis kinerja berarti semua kegiatan yang direncanakan harus berdasarkan pada *out put* bukan lagi pada *in put.* Anggaran seperti ini menjadi konsep value for money yaitu ekonomis, efektif dan effisien sehingga kinerja pemerintah daerah lebih mudah diukur.

Penilaian kinerja pemerintah daerah sangat penting dilakukan untuk memberikan arahan dan panduan berkaitan dengan rencana yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja ini diharapkan pemerintah daerah akan bekerja semakin baik,transparan dan akuntabel. Evaluasi kemampuan dearah dapat dengan menggubkan indikator masukan, keluaran, hasil dan dampak (UU No.32 Tahun 2004). Penilaian kinerja yang berkaitan dengan anggaran dapat berupa penilaian dengan menggunakan rasio-rasio antar komponen dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Arus Kas).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis termotivasi untuk meneliti kinerja keuangan pemerintah dengan judul penelitian "Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini "Apakah pengukuran rasio kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ?"

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (ada atau tidaknya) pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Bagi penulis manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan bagaimana menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Bagi STIE Perbanas Surabaya manfaat penelitian ini sebagai bahan informasi tambahan serta memberikan wawasan dan gambaran sebagai referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

c. Bagi Institusi

Bagi institusi dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja keuangannya pada tahun-tahun berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk memudahkan pembahasan, maka akan dibagi dalam beberapa bab yang disusun secara sistematika dengan uraian sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan – alasan yang mendukung permasalahan dari

penelitian, perumusan masalah yang berisi tentang masalah – masalah yang nantinya akan dicari jawabannya melalui penelitian, tujuan penelitian untuk mencari jawabannya melalui penelitian, manfaat penelitian yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang teori yang mendasari penelitian, terdiri dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang, teori – teori ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan kerangka pemikiran penelitian yang memberikan gambaran bagaimana alur hubungan variabel yang akan diteliti serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang didalamnya terdapat sub bab yang meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas mengenai gambaran subjek penelitian yang digunakan dan juga data yang sudah diolah dengan menggunakan alat uji statistik untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak serta dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang menyimpulkan hasil dari analisis yang dilakukan. Disamping itu disertakan pada beberapa keterbatasan dari penelitian ini serta saran yang diharapkan dapat dipakai sebagai bahan perbandingan agar tidak salah dalam pengambilan keputusan.